

# Analisis Promosi Keamanan Manusia oleh Kemlu RI: Studi Kasus Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB

Karin Wahyu Cahyaningrum

*UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia*

*E-mail: karinwahyukyu32@gmail.com*

## Abstract

Artikel ini membahas peran dan upaya Kemlu RI dalam mempromosikan keamanan manusia selama masa keanggotaannya di Dewan HAM PBB. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Indonesia, Kemlu RI berperan aktif dalam berbagai forum internasional untuk mengadvokasi perlindungan dan pemajuan HAM. Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa isu-isu HAM menjadi bagian integral dari kebijakan dan program internasional, mencakup pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan keamanan global. Inisiatif yang dilakukan meliputi advokasi dalam pembangunan berkelanjutan, perlindungan kelompok rentan, peningkatan kapasitas nasional, serta dialog dan transparansi. Melalui diplomasi multilateral, Indonesia mendorong negara-negara lain untuk memperkuat komitmen mereka terhadap HAM dan mengakhiri perang serta konflik yang menyebabkan penderitaan individu. Artikel ini juga menyoroti pentingnya Dewan HAM PBB dalam mengatasi tantangan HAM terkini, dengan mendorong transparansi, dialog, dan introspeksi atas kinerja mereka. Hasil dari upaya-upaya ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berperan aktif dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan aman, tetapi juga menunjukkan dedikasi Indonesia terhadap HAM secara global. Dengan demikian, artikel ini memberikan gambaran komprehensif tentang kontribusi Kemlu RI dalam mempromosikan keamanan manusia di panggung internasional.

**Keywords:** Keamanan Manusia; HAM; Kemlu RI; Dewan HAM; PBB

## Pendahuluan

Seiring berkembangnya zaman yang selaras dengan menghantarkan dunia pada serangkaian perubahan di dalamnya. Di dalam dunia hubungan

internasional sendiri pun terjadi pergeseran isu yang pada mulanya berfokus kepada *state-centric* atau keamanan negara dengan menekankan kebijakan luar negeri terhadap kekuatan militer dan politik. Namun, pada masa sekarang ini bergeser kepada *people-centric* atau *human security*.<sup>i</sup> Pergeseran isu dalam hubungan internasional ini menandai adanya perubahan cara pandang dunia yang menaruh perhatiannya kepada isu manusia. Hal ini mencerminkan kepedulian global terhadap perlindungan dan pemberdayaan individu dari ancaman yang mengancam kehidupan, kebebasan, dan hak asasi manusia.<sup>ii</sup>

Keamanan manusia adalah konsep yang menekankan pentingnya melindungi dan memberdayakan individu dari ancaman yang dapat mengancam kehidupan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Konsep ini diperkenalkan secara luas oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dalam laporan tahun 1994, keamanan manusia mencakup berbagai dimensi yang memengaruhi kesejahteraan individu, termasuk keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik.<sup>iii</sup> Konsep ini berkembang seiring dengan pergeseran paradigma keamanan yang semula berfokus pada pertahanan negara menjadi lebih luas mencakup aspek-aspek lain seperti ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan, dan hak asasi manusia.

Dalam konteks global, keamanan manusia menjadi sangat penting mengingat adanya ancaman-ancaman lintas batas negara seperti terorisme, perdagangan manusia, kejahatan transnasional, wabah penyakit, bencana alam, dan krisis ekonomi. Ancaman-ancaman ini tidak hanya membahayakan keamanan negara, tetapi juga mengancam keselamatan dan kesejahteraan warga negara secara langsung.<sup>iv</sup> Terlebih, hadirnya globalisasi telah meningkatkan interdependensi antara negara dan individu di seluruh dunia. Isuisu seperti perubahan iklim, pandemi, dan terorisme tidak mengenal batas negara, sehingga memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif. Misalnya, pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana krisis kesehatan dapat berdampak luas pada ekonomi global, mobilitas manusia, dan stabilitas politik.

Mengingat betapa pentingnya isu keamanan manusia, Indonesia menjadi salah satu contoh negara yang menaruh perhatian besarnya terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, baik itu di level regional maupun global. Indonesia sendiri telah membangun jejak sejarahnya dalam menyuarakan keamanan manusia di kancah global. Indonesia menunjukkan dedikasinya terhadap keamanan manusia melalui berbagai inisiatif dan kebijakan luar negerinya. Sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia aktif mempromosikan keamanan manusia di forum internasional. Keanggotaan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mengadvokasi hak asasi manusia dan keamanan manusia secara global.

Melalui penelitian ini, penulis akan memaparkan upaya promosi yang dilakukan Indonesia, khususnya melalui Kemlu RI dalam menyuarakan keamanan manusia di kancah global selama menjabat sebagai anggota Dewan HAM PBB. Pada penelitian ini, peneliti akan menjawab pertanyaan “Bagaimana upaya promosi keamanan manusia oleh Kemlu RI?” dan “Bagaimana peran Indonesia sebagai Dewan HAM PBB?” Dengan menganalisis strategi dan inisiatif Kemlu RI, penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai kontribusi Indonesia dalam mengadvokasi keamanan manusia di tingkat global serta dampak keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB terhadap kebijakan domestik dan internasional.

### **Kemlu RI dan Keamanan Manusia**

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) merupakan institusi pemerintah yang berperan vital dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan luar negeri Indonesia. Kemlu RI menjadi institusi pertama sebelum dilakukannya segala urusan kebijakan luar negeri Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1945, Kemlu RI telah mengukir sejarah diplomasi yang kuat dan bermartabat, dengan tujuan utama memperjuangkan kepentingan nasional dan berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian serta kemakmuran global melalui hubungan kerja sama internasional. Dalam upayanya, Kemlu RI senantiasa berupaya memperluas jaringan kemitraan dengan negara-negara lain dan organisasi internasional. Kerja sama ini meliputi berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, budaya, sains dan teknologi, serta isu-isu global lainnya.

Salah satu prioritas utama Kemlu RI adalah memperkuat peran Indonesia dalam berbagai forum internasional untuk menyuarakan dan menjunjung isu keamanan manusia dan HAM. Mewujudkan kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana amanat konstitusi Indonesia sesuai UUD 1945 yang harus diupayakan oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di tanah air, termasuk Kemlu RI.<sup>v</sup> Diplomasi Indonesia di bidang HAM dalam forum-forum internasional sepenuhnya didedikasikan untuk kepentingan nasional, yakni membangun reputasi Indonesia sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi HAM, serta berkontribusi dalam upaya global untuk memajukan dan melindungi HAM. Upaya Indonesia dalam menegakkan isu keamanan manusia termasuk pada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB). Dimana Indonesia telah terpilih hingga sebanyak 6 kali untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB yakni, untuk periode 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, 2020-2022 dan barubaru ini Indonesia kembali terpilih untuk periode 2024-2026.<sup>vi</sup> Melalui

realitas ini, dapat dilihat bahwa Indonesia terus berkomitmen untuk mendorong penegakan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia.

### **Promosi Keamanan Manusia oleh Kemlu RI**

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memainkan peran krusial dalam mempromosikan keamanan manusia di tingkat global, terutama melalui keanggotaannya di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB). Dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai institusi nasional yang melaksanakan kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal perlindungan terhadap keamanan manusia, Kemlu RI selalu bermain aktif dalam forum-forum internasional sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan tugasnya selaku anggota Dewan HAM PBB. Indonesia aktif dalam berbagai sesi dan pertemuan untuk mengadvokasi keamanan manusia. Melalui diplomasi multilateral, Indonesia bekerja untuk memastikan bahwa isu-isu HAM dimasukkan dalam kebijakan dan program internasional. Ini termasuk pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan keamanan global. Indonesia juga sering memprakarsai dan mendukung resolusi serta deklarasi yang menekankan pentingnya keamanan manusia, seperti perlindungan hak-hak perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

Dalam forum internasional, Kemlu RI selalu konsisten untuk mengajak negara-negara lain dapat memperkuat komitmen negara mereka terhadap HAM. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa diperlukan adanya aksi nyata untuk kemanusiaan dimana perang dan konflik yang berimbas pada kesengsaraan individu harus diakhiri. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa diperlukan upaya-upaya pencegahan untuk menghindari adanya pelanggaran HAM. Dalam hal ini Dewan HAM dapat berkontribusi melalui peningkatan kapasitas nasional dan fasilitasi peningkatan kapasitas. Terakhir, Menlu Retno juga menyampaikan melalui adanya Dewan HAM PBB ini maka harus dimanfaatkan dalam mengatasi tantangan HAM terkini sekaligus dilakukannya transparansi dialog dan introspeksi akan kinerja mereka sebelumnya<sup>vii</sup>

Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa HAM menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan. Melalui berbagai inisiatif di Dewan HAM PBB, Indonesia mendorong negara-negara anggota untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan pembangunan mereka, sehingga pembangunan dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan 7 konsep keamanan manusia yang diperkenalkan oleh UNDP. Terdapat beberapa komponen yang ada dalam

konsep keamanan manusia, dimana komponen tersebut menjadi acuan setiap negara dalam menerapkan strategi untuk mempromosikan keamanan manusia, termasuk Indonesia. Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keamanan ekonomi, kondisi dimana individu, rumah tangga, dan komunitas memiliki akses yang stabil dan berkelanjutan terhadap sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.
2. Keamanan pangan, kondisi dimana setiap individu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi, dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka.
3. Keamanan kesehatan, kondisi dimana setiap individu memiliki akses yang cukup dan terjamin terhadap layanan kesehatan.
4. Keamanan lingkungan, kondisi dimana setiap individu dan insan manusia terlindungi dari ancaman lingkungan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan.
5. Keamanan pribadi, kondisi dimana setiap individu bebas dari ancaman fisik, psikologis, dan emosional yang dapat mengancam kesejahteraan mereka.
6. Keamanan komunikasi, kondisi dimana praktik penggunaan teknologi yang melindungi informasi penggunaannya.
7. Keamanan politik, kondisi dimana sistem politik suatu negara berjalan dengan stabil dan berintegrasi untuk melindungi masyarakatnya dari segala ancaman.<sup>viii</sup>

Melalui sejarah kinerja dan dedikasi Kemlu RI yang vokal dalam menyuarakan keamanan manusia dan HAM ini sebagai bentuk nyata adanya promosi keamanan manusia yang dilakukan oleh Kemlu RI demi menyatukan suara aktor internasional terkait pentingnya perhatian terhadap isu keamanan manusia.

## Kesimpulan

Kemlu RI telah memainkan peran penting dalam mempromosikan keamanan manusia selama masa keanggotaannya di Dewan HAM PBB. Melalui berbagai inisiatif dan kerja sama internasional, Indonesia berusaha untuk meningkatkan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM di seluruh dunia. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan dedikasi Indonesia terhadap HAM, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai negara yang berperan aktif dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan aman. Dengan terus mendorong dialog, transparansi, dan kerja sama internasional, Kemlu RI berkomitmen untuk melanjutkan upaya ini demi tercapainya keamanan manusia yang komprehensif.

## References

- <sup>i</sup> Ayusia Sabhita Kusuma, *"Human Security Dalam Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar,"* (Bantul: Pustaka Ilmu, 2022), halaman 6. <sup>ii</sup> Elpeni Fitrah, *"Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia,"* INSIGNIA, Vol. 2, No. 1, 2015, halaman 26.
- <sup>iii</sup> United Nations Development Programme (UNDP), *"Human Security: A New Perspective for Human Development,"* (1994), New York: UNDP.
- <sup>iv</sup> Tian Adhia Nugraha dan Audry Maura, *"Analisis Politik Luar Negeri Indonesia: Promosi 'Keamanan Manusia' di Palestina,"* Jurnal Hubungan Luar Negeri, Vol. 8, No. 2, 2023, halaman 88.
- <sup>v</sup> Kemlu, *"Indonesia dan Perlindungan Hak Asasi Manusia,"* (Kemlu.go.id, 2019), diakses pada 30 Mei 2024, [https://kemlu.go.id/portal/id/read/97/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-dan-hak-asasimanusia#!](https://kemlu.go.id/portal/id/read/97/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasimanusia#!). <sup>vi</sup> Benedikta Miranti T.V., *"Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB Periode 2024-2026 dengan Suara Terbanyak, Siap Jalankan 3 Prioritas Utama Ini,"* (Liputan6, 2023), diakses pada 30 Mei 2024, <https://www.liputan6.com/global/read/5420320/indonesia-terpilih-jadi-anggotadewan-ham-pbb-periode-2024-2026-dengan-suara-terbanyak-siap-jalankan-3prioritas-utama-ini>. <sup>vii</sup> Kemlu RI, *"Peringati 75 Tahun Deklarasi Universal HAM, Menlu RI Ajak Negara-negara Perkuat Komitmen terhadap HAM,"* (Kemlu.go.id, 2023), diakses pada 2 Juni 2024, <https://kemlu.go.id/portal/id/laporan%20kinerja/read/4493/berita/peringati-75-tahundeklarasi-universal-ham-menlu-ri-ajak-negara-negara-perkuat-komitmen-terhadapham#!>. <sup>viii</sup> UNDP, *"Human Development Report 1994,"* (New York: Oxford University Press, 1994), halaman 24-25.